

Optimalisasi Akuntabilitas Lingkungan Dalam Pengelolaan Ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture* Dalam Konteks *Good Tourism Governance* (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)

Eni Apriliani^{1*}, Irvan Arif Kurniawan¹ dan Muhammad Yus Firdaus¹

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

*Correspondence author: 2101010005@students.unis.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the condition of the implementation of environmental accountability in the management of Ketapang Urban Aquaculture Ecotourism in Tangerang Regency based on the principles of Good Tourism Governance (GTG). This study was motivated by the problem of decreasing number of visitors and damage to facilities in the ecotourism area, which is considered related to the less than optimal implementation of environmental accountability. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of environmental accountability in Ketapang Urban Aquaculture has not been fully optimal, especially in terms of increasing employment opportunities, increasing income, public health, and sustainable management of natural resources. This study is expected to be an input for local governments, tourism managers, and the community in strengthening the implementation of environmental accountability as part of the principles of Good Tourism Governance for the sustainability of ecotourism.*

Keywords: *environmental accountability; ecotourism; good tourism governance; ketapang urban aquaculture.*

How to Cite:

Apriliani, E., Kurniawan, I. A., & Firdaus, M. Y. (2025). Optimalisasi Akuntabilitas Lingkungan Dalam Pengelolaan Ekowisata Ketapang Urban Aquaculture Dalam Konteks Good Tourism Governance (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 201-212. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.10.2.2025.201-212>

1. Pendahuluan

Saat ini pembangunan sektor pariwisata di Indonesia diarahkan pada penerapan prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini diyakini mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara terencana untuk mendukung penggunaan yang berkelanjutan (Sharpley dalam Budiani *et al.*, 2018). Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan kepariwisataan berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dengan prinsip keberlanjutan sebagai dasar pengelolaan agar tetap relevan bagi kebutuhan masa kini dan mendatang (Nugraha *et al.*, 2024).

Ekowisata menjadi salah satu bentuk konkret dari pariwisata berkelanjutan, yang menekankan pendekatan wisata alam untuk tujuan edukasi, pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Utamy *et al.*, 2023). Salah satu destinasi yang merepresentasikan transformasi ini adalah Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Wilayah ini semula dikenal sebagai daerah pesisir yang kumuh dan rawan

banjir rob, kemudian bertransformasi menjadi kawasan ekowisata mangrove melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir Pantai (Gerbang Mapan) sejak 2016. Perubahan signifikan terjadi pada 2019 melalui kolaborasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), termasuk pembangunan infrastruktur, sarana wisata, dan permukiman warga. Perkembangan tersebut mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bahkan memperoleh perhatian internasional dalam forum PEMSEA (*Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia*) pada Oktober 2022 (Dany, 2022).

Pengelolaan kawasan ini diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 89 Tahun 2022, yang memberikan pedoman pengelolaan kawasan *Ketapang Urban Aquaculture*, serta Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 yang menunjuk Perusahaan Daerah Mitra Kerta Raharja (MKR) sebagai pengelola utama. Namun demikian, penerapan regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Salah satu tantangan utama adalah penurunan signifikan jumlah pengunjung pada tahun 2024. Berdasarkan data kunjungan, terjadi penurunan hingga lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penurunan paling drastis pada bulan April. Tarif masuk yang dinilai tinggi, ditambah dengan biaya parkir yang terpisah, menjadi keluhan utama pengunjung. Selain itu, kerusakan fasilitas seperti jembatan kayu yang lapuk dan membahayakan keselamatan turut menurunkan kenyamanan pengunjung. Adapun tantangan dalam pengelolaan ekowisata di *Ketapang Urban Aquaculture*, permasalahan yang pertama adalah penurunan jumlah pengunjung. Penurunan jumlah pengunjung terjadi cukup signifikan pada tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan pada grafik 1.



Figure 1. Jumlah pengunjung *Ketapang Urban Aquaculture*

Berdasarkan grafik jumlah pengunjung, *Ketapang Urban Aquaculture* mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari data tersebut, penurunan paling drastis terjadi pada bulan April, dari 30.157 orang pada tahun 2023 menjadi 10.170 orang pada tahun 2024, hampir semua bulan mengalami penurunan lebih dari 50%. Salah satu isu utamanya adalah tarif masuk wisata yang tinggi, yakni Rp 15.000 dikenakan bagi orang dewasa, sedangkan Rp 10.000 untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah, belum termasuk biaya parkir. Selain biaya tersebut, pengunjung juga perlu membayar biaya parkir secara terpisah, pengguna motor dikenakan Rp 8.000, mobil Rp 15.000, dan bus Rp 50.000.

Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan prinsip *Good Tourism Governance* (GTG) yang mengadaptasi nilai-nilai *good governance* dalam pengelolaan sektor pariwisata. Menurut

Sunaryo (2013), keberhasilan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sangat bergantung pada implementasi GTG secara menyeluruh. GTG mencakup aspek partisipasi, keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan yang menekankan pada kolaborasi multi-pihak dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi wisata (Rafa *et al.*, 2022).

Salah satu indikator utama GTG adalah akuntabilitas lingkungan, yaitu tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan destinasi tidak merusak lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem lokal. Aspek ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta peningkatan kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang sehat.

Terdapat sepuluh indikator keberhasilan *Good Tourism Governance*, yang menekankan dalam menjalankan keberhasilannya yaitu; partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan (Utamy *et al.*, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya penerapan GTG dalam pengelolaan pariwisata, namun belum banyak yang secara khusus membahas penerapan prinsip akuntabilitas lingkungan dalam konteks Ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture*. Padahal, kawasan ini menghadapi tantangan nyata yang berisiko terhadap keberlanjutan ekosistem mangrove dan kenyamanan pengunjung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana akuntabilitas lingkungan telah dioptimalkan dalam pengelolaan Ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture* dalam konteks *Good Tourism Governance*.

2. Konsep dan Teori

Ekowisata

Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang mengintegrasikan upaya pelestarian alam, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penghargaan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat sekitar (Nurul *et al.*, 2021). Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), ekowisata juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan kawasan wisata. Dalam pengelolaannya, pendekatan ekowisata menempatkan aspek edukatif dan konservatif sebagai prioritas, bukan sekadar pencapaian keuntungan ekonomi. Ditjen Bina Pembangunan Daerah (2021) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan wisata sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan.

Mukhlison (2000) menambahkan bahwa ekowisata merupakan aktivitas wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan menjaga kelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi semata, tetapi lebih jauh menekankan prinsip konservasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat. Fokus utama ekowisata adalah menjaga lingkungan melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal dan penyadaran pengunjung akan pentingnya pelestarian sumber daya alam. Salah satu contoh konkret penerapan prinsip-prinsip ekowisata ini dapat ditemukan pada pengembangan kawasan *Ketapang Urban Aquaculture* di Kabupaten Tangerang.

Ketapang Urban Aquaculture

Ketapang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 4,169 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 6.542 jiwa. Salah satu sumber penghasilan utama masyarakat Desa Ketapang berasal dari sektor pariwisata, khususnya melalui destinasi ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture*. Kawasan wisata ini dikenal sebagai destinasi alam berbasis ekosistem mangrove yang menawarkan keindahan hutan bakau, sungai yang berkelok, serta kekayaan flora dan fauna khas pesisir (Apriliani et al., 2025). *Ketapang Urban Aquaculture* menjadi representasi penting dari model pengelolaan ekowisata yang memadukan fungsi konservasi dan ekonomi lokal.

Tabel 1. Informasi Wilayah dan Kawasan *Ketapang Urban Aquaculture*

Aspek	Keterangan
Luas Desa Ketapang	4,169 km ² (setara ±416,9 hektar)
Jumlah Penduduk Desa <i>Ketapang</i>	6.542 jiwa
Luas Kawasan <i>Ketapang Urban Aquaculture</i>	14,5 hektar
Jenis Mangrove yang Dibudidayakan	±16 jenis mangrove
Tahun Mulai Penanaman Mangrove	2019
Tahun Peresmian Ekowisata	2023

Sumber: diolah oleh peneliti 2025

Pengembangan kawasan ini dimulai pada tahun 2019 dengan penanaman berbagai jenis pohon mangrove yang berfungsi sebagai pelindung wilayah pesisir dari risiko bencana alam dan abrasi. Kawasan ini kemudian diresmikan sebagai destinasi ekowisata pada tahun 2023 (Prabowo et al., 2023). Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, destinasi ini juga mendukung program unggulan Bupati Tangerang, yaitu Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai), yang bertujuan mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perpaduan antara upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi lokal menjadikan Ketapang Urban Aquaculture sebagai contoh konkret penerapan prinsip ekowisata yang menyeluruh dan strategis (Ariesta & Sarudin, 2023).

Untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan wisata seperti Ketapang Urban Aquaculture berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan, maka diperlukan suatu kerangka tata kelola yang baik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hal tersebut adalah konsep Good Tourism Governance (GTG).

Good Tourism Governance

Konsep *Good Tourism Governance* atau tata kelola pariwisata yang baik merupakan pendekatan penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Pendekatan ini menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan pariwisata (Hajar et al., 2024). Sedangkan Menurut Sunaryo (2013), dapat tercapainya sasaran dan strategi dalam pembangunan kepariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan jika dalam prosesnya dilakukan dengan tata kelola kepariwisataan yang baik (*Good Tourism Governance*). Dalam prinsip ini menekankan koordinasi antar pemangku kepentingan serta partisipasi aktif yang sinergis antara pemerintah, swasta/industri pariwisata, dan masyarakat setempat (Sunaryo, 2013). Sunaryo (2013) mengemukakan bahwa indikator GTG mencakup sepuluh aspek sebagai berikut: 1) Partisipasi Masyarakat, 2) Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan, 3) Kemitraan Kepemilikan Lokal, 4)

Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut, 5) Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat, 6) Daya Dukung Lingkungan, 7) Monitoring dan Evaluasi Program, 8) Akuntabilitas Lingkungan, 9) Pelatihan pada Masyarakat Terkait, 10) Promosi dan Advokasi Nilai Budaya.

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada indikator akuntabilitas lingkungan karena indikator ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.

Akuntabilitas Lingkungan

Menurut Sunaryo (2013), akuntabilitas lingkungan dalam perencanaan pembangunan pariwisata harus memperhatikan peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan kesehatan masyarakat setempat. Pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan.

Penelitian ini menggunakan kerangka akuntabilitas lingkungan menurut Sunaryo (2013) untuk menganalisis tanggung jawab pengelola Ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture* dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk dalam menyikapi persoalan kenaikan tarif masuk dan kerusakan fasilitas, agar keberlanjutan kawasan tetap terjaga.

3. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture* yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tangerang. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung sejak Oktober 2024 hingga Juli 2025. Penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivisme*, yang berfokus pada penjelasan atau deskripsi terhadap fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pemahaman dari perspektif subjek yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan penerapan prinsip akuntabilitas lingkungan dalam kerangka *Good Tourism Governance* pada pengelolaan ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture*. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam (interview), dokumentasi, dan kuesioner sebagai pelengkap. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, dokumen, arsip, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dinilai memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan ekowisata tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

Temuan hasil penelitian terkait penerapan akuntabilitas lingkungan dalam pengelolaan Ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture*. Hasil yang disampaikan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola, masyarakat sekitar, dan pengunjung, serta observasi lapangan.

Peningkatan Kesempatan Kerja

Penerapan prinsip akuntabilitas lingkungan dalam pengelolaan Ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture* mencakup dimensi sosial-ekonomi, salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pengelolaan kawasan ini merujuk pada dua dasar hukum utama, yaitu Peraturan Bupati Tangerang Nomor 69 Tahun 2022 tentang penugasan pengelolaan kawasan dan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 mengenai pedoman pelaksanaannya. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari keberlanjutan pengelolaan ekowisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer kawasan, PT Mitra Kerta Raharja (MKR) sebagai pengelola utama mengutamakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja utama, tanpa membatasi latar belakang pendidikan atau keahlian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelibatan langsung terhadap masyarakat terdampak pembangunan kawasan yang sebelumnya merupakan wilayah kumuh dan rawan banjir. Penerimaan pegawai juga mengacu pada prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dalam pembukaan akses kerja.

Data lapangan menunjukkan bahwa sekitar 90% pegawai di bidang pemeliharaan dan kebersihan berasal dari warga lokal. Di samping itu, warga yang memiliki keahlian tertentu, seperti konstruksi atau perawatan fasilitas umum, juga dilibatkan ketika terdapat kebutuhan teknis seperti perbaikan toilet dan jogging track. Pola pelibatan ini menunjukkan adanya integrasi antara pengelolaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat berbasis keterampilan lokal, yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas sosial masyarakat.

Selain perekrutan langsung, peluang usaha juga diberikan kepada masyarakat setempat. Namun, kebijakan yang diterapkan cukup selektif, di mana kegiatan perdagangan di dalam area *Ketapang Urban Aquaculture* hanya diperbolehkan saat terdapat event tertentu, seperti acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau kerja sama dengan *Event Organizer*. Dalam kondisi reguler, aktivitas perdagangan di dalam kawasan dilarang untuk menjaga ketertiban dan kualitas lingkungan ekowisata.

Kebijakan tersebut menimbulkan dinamika tersendiri dalam partisipasi ekonomi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi secara ekonomi dalam waktu-waktu tertentu, namun di sisi lain terdapat keterbatasan bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan akses yang lebih luas dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat situasional dan belum sepenuhnya terintegrasi secara permanen dalam pengelolaan kawasan.

Penerapan prinsip ini selaras dengan teori dari Sunaryo (2013) yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan harus mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui kesempatan kerja maupun pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Selain itu, temuan ini didukung oleh penelitian (Kumar et al., 2023) dan (Rianti, 2018) yang menyebutkan bahwa ekowisata memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan *Ketapang Urban Aquaculture* telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas lingkungan dalam aspek sosial-ekonomi. Peluang kerja dan usaha yang diberikan kepada masyarakat merupakan indikator nyata

keberhasilan penerapan *Good Tourism Governance*. Oleh karena itu penerapan akuntabilitas lingkungan pada indikator peningkatan kesempatan kerja dapat dikatakan optimal.

Peningkatan pendapatan

Meskipun telah tersedia kesempatan kerja bagi warga, peningkatan pendapatan ekonomi masih dirasakan secara terbatas dan belum merata, terutama bagi kelompok masyarakat seperti pedagang kecil dan nelayan, yang belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari adanya kawasan ini. Penurunan jumlah pengunjung serta pembatasan aktivitas usaha menjadi kendala utama. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip GTG yang menekankan pentingnya distribusi manfaat ekonomi secara adil, yang merupakan bagian dari indikator akuntabilitas lingkungan menurut Sunaryo (2013).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan pelaku usaha kecil menurun seiring dengan berkurangnya kunjungan wisatawan. Penurunan drastis jumlah pengunjung pada tahun 2024, seperti tercermin dalam grafik kunjungan, berdampak langsung pada sepiunya aktivitas jual-beli di sekitar kawasan. Selain itu, pembatasan aktivitas berjualan serta kewajiban membayar sejumlah biaya saat event berlangsung menjadi beban tambahan bagi pedagang kecil. iaya tersebut terasa memberatkan karena tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh seorang pedagang bahkan mengaku hanya mendapatkan Rp20.000 pada hari Minggu.

Dalam kondisi ini, potensi pendapatan tidak mampu menutup biaya operasional harian. Situasi serupa juga dialami oleh pedagang lain yang hanya memilih berjualan pada akhir pekan. Menurut pengakuannya, kebijakan tarif masuk kawasan yang dianggap tinggi menjadi salah satu penyebab utama menurunnya minat pengunjung. Sebelum diberlakukan biaya masuk, kawasan ini dinilai cukup ramai, khususnya pada akhir pekan. Namun sejak tarif diberlakukan, pengunjung menurun drastis, menyebabkan sebagian besar pedagang enggan berjualan di hari biasa karena minimnya pembeli. Hal ini menyebabkan pendapatan bersifat musiman dan tidak berkelanjutan.



Gambar 1. Gerobak Pedagang yang tidak Beroperasi Pada Hari Biasa di Sekitar Kawasan *Ketapang Urban Aquaculture*

Observasi peneliti di lapangan mendukung temuan tersebut. Gerobak dagangan yang tampak tidak beroperasi pada hari biasa menggambarkan secara visual adanya stagnasi aktivitas ekonomi.

Situasi ini mengonfirmasi pernyataan pedagang mengenai pola penjualan yang terbatas hanya pada akhir pekan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan ekowisata, meskipun memberikan peluang kerja, belum mampu menjawab tantangan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Dampak ekonomi yang terbatas tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi juga oleh nelayan tradisional. Sebelum kawasan ini dialihfungsikan menjadi ekowisata dan dilakukan penanaman mangrove, wilayah ini merupakan kampung pelelangan yang aktif dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Namun, dengan berubahnya fungsi kawasan menjadi ekowisata, banyak nelayan mengalami kerugian karena akses dan hasil tangkapan yang semakin menurun, bahkan beberapa di antaranya berhenti total dari pekerjaan sebagai nelayan.

Meski begitu, pengelola kawasan telah melakukan beberapa inisiatif untuk mendukung pendapatan masyarakat melalui promosi produk lokal berbasis mangrove seperti dodol, sirup, keripik, dan kerupuk. Promosi dilakukan melalui media sosial dan juga secara langsung saat menerima tamu atau wisatawan. Meskipun langkah ini positif, dampaknya belum merata karena hanya melibatkan segelintir pelaku usaha yang terhubung dengan unit produksi tertentu. Banyak warga lainnya, terutama yang tidak memiliki akses terhadap modal atau jaringan distribusi, belum menikmati manfaat ekonomi dari upaya promosi ini.

Jika dibandingkan dengan penelitian Hutahaean, Kapantow & Baroleh (2024) di Desa Budo, Minahasa Utara, terlihat bahwa ekowisata mangrove dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan keluarga jika pengelolaannya dilakukan secara inklusif dan melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, tantangan utama dalam konteks *Ketapang Urban Aquaculture* adalah bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dapat diperluas agar manfaat ekonomi ekowisata dapat dirasakan secara adil. Penerapan akuntabilitas lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryo (2013), tidak cukup hanya dengan menyediakan pekerjaan, tetapi harus mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas lingkungan menurut Sunaryo (2013) terkait peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal.

Kesehatan Masyarakat

Transformasi Desa Ketapang dari kawasan kumuh dan rawan abrasi menjadi destinasi ekowisata berbasis mangrove mencerminkan keberhasilan awal dalam membangun lingkungan yang lebih sehat dan tertata. Sebelumnya, kawasan ini sering mengalami banjir rob, abrasi hingga 1 kilometer, serta kondisi permukiman yang tidak layak. Melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir Pantai (Gerbang Mapan) sejak tahun 2016 dan dilanjutkan oleh program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada 2019, Desa Ketapang mengalami perubahan signifikan. Infrastruktur pendukung seperti jalan, kantor, dan kawasan permukiman ditata ulang untuk menunjang pariwisata dan meningkatkan ketahanan lingkungan.

Perbaikan lingkungan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan estetika kawasan, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang lebih bersih dan tertata diyakini mampu mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan penyakit kulit akibat genangan air. Pihak eksternal seperti Sekjen UCLG ASPAC juga mengapresiasi transformasi kawasan ini karena mampu menyediakan akses air bersih bagi warga, yang sebelumnya sulit diperoleh (Bappeda, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryo (2013), bahwa pembangunan pariwisata

seharusnya tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Tantangan baru muncul pasca revitalisasi, yaitu meningkatnya populasi nyamuk yang dirasakan warga sekitar. Beberapa warga menyatakan bahwa sejak adanya kawasan mangrove, jumlah nyamuk di pemukiman sekitar meningkat, khususnya pada sore hari, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi menjadi gangguan kesehatan. Fenomena ini juga didukung oleh hasil penelitian (Siwiendrayanti et al., 2020), yang menjelaskan bahwa ekosistem mangrove, terutama di daerah tropis, dapat menjadi habitat alami bagi nyamuk. Oleh karena itu, aspek pengendalian vektor penyakit menjadi penting dalam pengelolaan ekowisata berbasis lingkungan.

Permasalahan tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan pariwisata tidak cukup hanya memperhatikan aspek visual atau estetika, tetapi harus memperhitungkan aspek ekologi mikro yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti persebaran nyamuk. Jika tidak ditangani secara sistematis, keberadaan nyamuk dapat meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Oleh karena itu Indikator kesehatan masyarakat juga belum sepenuhnya optimal. Maka dari itu, pengelolaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase perlu diperkuat, baik oleh pengelola kawasan maupun dinas terkait, sebagai bagian dari implementasi prinsip akuntabilitas lingkungan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan *Ketapang Urban Aquaculture* dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 89 Tahun 2022, yang menjadi dasar penyusunan struktur organisasi, pedoman teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dokumen ini memberikan panduan bagi pengelola dalam menata kawasan secara sistematis, termasuk kegiatan penghijauan, pemeliharaan vegetasi yang sudah ada, dan pelestarian ekosistem mangrove. Implementasi ini menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip akuntabilitas lingkungan dalam bentuk pengelolaan sumber daya secara terencana dan sesuai regulasi.

Selain aspek penghijauan, pengelolaan air laut sebagai sumber daya utama menjadi perhatian penting dalam operasional kawasan. Pengelola memanfaatkan sistem pintu air untuk mengontrol volume air yang masuk dan keluar kawasan. Ketika air mencapai volume berlebih, pintu ditutup untuk mencegah banjir; sebaliknya, jika air melimpah dalam kawasan, pintu dibuka agar kelebihan air dapat dikeluarkan. Praktik ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika alam yang relevan dengan prinsip keberlanjutan dan ekologi tropis, terutama dalam konteks kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim.

Dari sudut pandang masyarakat, pengelolaan kawasan dianggap cukup baik. Warga mengapresiasi upaya pengelola dalam menjaga kebersihan, menata pepohonan, serta melibatkan tenaga kerja lokal dalam pemeliharaan lingkungan. Pengunjung pun menyatakan bahwa kawasan terasa nyaman dan terawat, sehingga memberi kesan positif saat berwisata. Penilaian ini menunjukkan keberhasilan awal pengelolaan sumber daya alam dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan mendukung kenyamanan sosial-ekologis kawasan.

Namun demikian, observasi di lapangan mengungkapkan adanya beberapa masalah dalam aspek teknis pemeliharaan, khususnya pada fasilitas publik. Peneliti menemukan papan jembatan yang telah lapuk dan patah, yang dapat membahayakan keselamatan pengunjung (sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2). Selain itu, fasilitas toilet pria dalam kondisi sangat kotor, saluran pembuangan menghitam, dan lantai basah serta licin (sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3).



Gambar 2. Kondisi papan kayu yang rusak



Gambar 3. Kondisi Toilet Pria yang Tidak Terawat

Permasalahan fasilitas publik tersebut secara langsung memengaruhi pengalaman wisatawan dan menurunkan citra kawasan sebagai destinasi ekowisata berbasis akuntabilitas lingkungan. Menurut Sunaryo (2013), salah satu prinsip penting dalam *Good Tourism Governance* adalah pemeliharaan fasilitas pendukung yang mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap keempat indikator, penerapan akuntabilitas lingkungan dalam pengelolaan Ekowisata Ketapang Urban Aquaculture dapat disimpulkan belum seluruhnya optimal. Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip *Good Tourism Governance* dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas lingkungan perlu menjadi fokus utama dalam pengelolaan kawasan ini ke depan, agar *Ketapang Urban Aquaculture* dapat berkembang sebagai destinasi ekowisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntabilitas lingkungan dalam pengelolaan Ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture*, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan kawasan telah menunjukkan penerapan akuntabilitas lingkungan berdasarkan prinsip *Good Tourism Governance* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryo (2013). Penerapan akuntabilitas lingkungan dalam pengelolaan Ekowisata *Ketapang Urban Aquaculture* telah menunjukkan upaya positif sesuai prinsip *Good Tourism Governance* menurut Sunaryo (2013), meskipun belum seluruhnya optimal.

Aspek peningkatan kesempatan kerja dinilai optimal, ditunjukkan dengan dominasi tenaga kerja dari masyarakat sekitar, terutama di sektor pemeliharaan dan kebersihan. Namun meskipun Meskipun telah tersedia kesempatan kerja bagi warga, aspek peningkatan pendapatan masih belum optimal, karena manfaat ekonomi belum dirasakan merata oleh kelompok pedagang kecil dan nelayan.

Pada aspek kesehatan masyarakat, penerapan akuntabilitas lingkungan tergolong cukup optimal, ditunjukkan dengan perbaikan kondisi lingkungan, meski masih terdapat gangguan seperti nyamuk. Sedangkan pada aspek pengelolaan sumber daya alam, penerapan dinilai belum optimal karena masih ditemui fasilitas umum yang rusak dan kurang terawat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip akuntabilitas lingkungan di *Ketapang Urban Aquaculture* telah memberikan kontribusi positif dalam beberapa aspek, seperti kesempatan kerja dan kesehatan masyarakat. Namun, penerapan akuntabilitas lingkungan dalam peningkatan pendapatan dan pemeliharaan fasilitas belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas lingkungan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, terutama dalam aspek peningkatan pendapatan dan perbaikan fasilitas, agar keberlanjutan dan kenyamanan pengunjung dapat tercapai secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Apriliani, E., Danti, R. R., Anggraini, A., & Febrianti, A. 2025. Kualitas pelayanan ekowisata mangrove di *Ketapang Urban Aquaculture* (KUA) Desa Ketapang Mauk Kabupaten Tangerang. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2, 139–149. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.173>
- Ariesta, I., & Sarudin, R. 2023. Analisis pengaruh daya tarik ekowisata terhadap minat berkunjung wisatawan di *Ketapang Urban Aquaculture* Mauk, Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2038–2049. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1282>
- Ardiatno, Y., & Mulyawati, L. S. 2024. Partisipasi masyarakat di kawasan wisata *Ketapang Urban Aquaculture*: Analisis kondisi eksisting dan tingkat partisipasi masyarakat. *Jurnal Komunitas dan Pemberdayaan*, 9(9), 15–29.
- Azahra, R., Anggraini, P. K., Nuryasin, A., Hasan, H., & Nuryadin, D. F. E. 2024. Kondisi ekosistem mangrove di kawasan *Ketapang Urban Aquaculture* berdasarkan indeks kesehatan mangrove. *Maiyah*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.20884/1.maiyah.2024.3.1.11514>
- Bappeda, A. (2023). *Ketapang Urban Aquaculture di Kabupaten Tangerang Mendapat Apresiasi Delegasi UCLG ASPAC*. Kabupaten Tangerang Gemilang. <https://bappeda.tangerangkab.go.id/detail-berita/ketapang-urban-aquaculture-di-kabupaten-tangerang-mendapat-apresiasi-delegasi-uclg-aspac>
- Budiani, S. R., Wahdaningrum, W., Yosky, D., Kensari, E., & Pratama, H. S. 2018. Analisis potensi dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(2), 170–185. <https://doi.org/10.22146/mgi.32330>
- Dany, F. W. W. 2022. *Desa Ketapang di Kabupaten Tangerang menuju panggung dunia*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/09/02/desa-ketapang-menuju-panggung-dunia>

-
- Hajar, S., Wahyudi, H., Arma, N. A., & Kholik, K. (2024). Tourism Policy Based on Good Tourism Governance in Realizing Sustainable Tourism in the Lake Toba Tourism Area, North Sumatera. 1043–1055.
- Kumar, S., Hasija, N., Kumar, V., & Sageena, G. 2023. Ecotourism: A holistic assessment of environmental and socioeconomic effects towards sustainable development. *Current World Environment*, 18(2), 589–607. <https://doi.org/10.12944/cwe.18.2.14>
- Nur, A. C., Akib, H., & Niswat, R. 2022. *Eksistensi administrasi publik pada arus globalisasi*. Makassar: Pustaka Pelajar.
- Prabowo, A., Merdeka, R. D. H., & Hayati, A. 2023. Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap pendapatan masyarakat di Taman Mangrove Ketapang Kabupaten Tangerang. *WisataMuh (Journal of Tourism and Hospitality)*. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/wisataMuh/article/view/9758>
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 89. 2022. Database Peraturan JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/244050/perbup-kab-tangerang-no-89-tahun-2022>
- Rianti, P. A. P. dan R. (2018). Dampak Pengembangan Ekowisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bengkayang : Studi Kasus Kawasan Ekowisata Riam Pangar. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.22146/jnp.59469>
- Siwiendrayanti, A., Anggoro, S., & Nurjazuli, N. (2020). Literature review: The contribution of mangrove ecosystem condition to mosquito population. *E3S Web of Conferences*, 202. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020205016>
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Utamy, W. A., Susanti, E., & Runiawati, N. 2023. *Good tourism governance* dalam pengelolaan ekowisata mangrove Kampung Teluk Semanting Kabupaten Berau. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 658–670. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45126>
- Widiantari, S. 2020. Penalaran moral sebagai pemoderasi pengaruh tipe nilai personal pada sikap akuntabilitas lingkungan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 221–230. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2329>